Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan
Vol. 11 No.1, Juli 2025
e-ISSN 2621 – 2676, p-ISSN 2528 - 0775

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI MASYARAKAT (STUDI KASUS PARTAI GELORA KOTA BINJAI)

[1]Vinni Dini Pratiwi, [2]Adiba Kanza Az-Zahra, [3]Jihan Syahira, [4]Zessleyn, [5]Nazib Khairul Athardst

[11]*Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai*
vinnidinipratiwi@stkipbudidaya.ac.id
[2]*Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai*
zahra20122005@gmail.com
[3]*Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai*
jihansyahira920@gmail.com
[4]*Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai*
zesslyn14@gmail.com
[5]*Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai*
najibvivo3@gmaoil.com

ABSTRAK

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Kota Binjai, sebagai partai politik baru yang didirikan pada tahun 2019, berupaya memainkan peran strategis dalam pendidikan politik masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi peran pendidikan politik oleh Partai Gelora di Kota Binjai, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa dari STKIP Budidaya dan studi literatur terkait. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Partai Gelora menyadari pentingnya pendidikan politik sebagai bagian dari fungsi normatifnya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi politik masyarakat, serta dominasi partai-partai mapan yang lebih dikenal oleh publik. Selain itu, terdapat hambatan internal seperti struktur organisasi yang belum matang dan kurangnya kaderisasi yang efektif. Peneliti merekomendasikan beberapa solusi dalam menyelesaikan tantangan ini, antara lain kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau akademisi, pendekatan lokal dalam penyampaian materi pendidikan politik, pemanfaatan media digital secara kreatif, serta melibatkan komunitas dalam kegiatan pendidikan politik. Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Gelora di Kota Binjai.

Kata Kunci: Pendidikan Politik,Masyarakat, Partai Politik

ABSTRAK

The People's Wave Party (Gelora) of Binjai City, as a new political party established in 2019, seeks to play a strategic role in public political education as part of efforts to strengthen democracy in Indonesia. This study aims to evaluate and analyze the implementation of the role of political education by the Gelora Party in Binjai City, as well as to identify the challenges and solutions faced in its implementation. The research method uses a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with students from STKIP Budidaya and related literature studies. Thematic analysis was used to identify the main themes in the implementation of political education by the party. The results of the study show that although the Gelora Party is aware of the importance of political education as part of its normative function, its implementation still faces various challenges. These challenges include limited resources, low political literacy of the community, and the dominance of established parties that are better known to the public. In addition, there are internal obstacles such as an immature organizational structure and a lack of effective cadre formation. The researcher recommends several solutions to overcome these challenges, including collaboration with non-governmental organizations (NGOs) or academics, a local approach in delivering political education materials, creative use of digital media, and involving the community in political education activities. These strategies are expected to increase the effectiveness of political education implemented by the Gelora Party in Binjai City.

Keywords: *Political Education, Society, Political Parties*

I. PENDAHULUAN

mencakup tinjauan pustaka dan memuat unsur latar belakang, permasalahan/rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis bila ada dapat dicantumkan, dan rancangan penelitian. Partai politik di Indonesia berakar dari organisasi Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908, menandai awal kesadaran politik nasional. Partai politik pertama yang resmi adalah Indische Partij, didirikan pada 25 Desember 1912, oleh Dr. Cipto Mangunkusumo dan rekan-rekannya, dengan tujuan mengakhiri penjajahan Belanda

Partai- partai politik adalah cermin kebebasan berserikat dan kebebasan berserikat serta kebebasan berekspresi (Ritonga, 2015), keberadaannya dilindungi oleh konstitusi dalam demokrasi konstitusional. Partai politik juga merupakan elemen penting dalam pembentukan aturan hukum yang demokratis. Dalam perwakilan preventif politik dalam lembaga formal negara, partai memiliki peran dan posisis trategis (Natalia, 2015; Ristyawati, 2019). Demokrasi prosedural dan substansial akan selalu menempatkan aktor politik utama yaitu partai politik sebagai instrumen yang menentukan jalannya pemilihan umum. Fungsi partai politik disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201, tepatnya di Pasal 11 ayat (1). Indonesia adalah menganut demokrasi, dimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam dan kehidupan politik secara bebas,tanpa tekanan tetapi masih dalam koridor hukum dan hukum (Amal, 2014). Demokrasi adalah salah satu bentuk kebebasan seseorang atau warga negara untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasinya (Edward et al., 2019; Sarbani, 2013). Demokrasi akan melahirkan supremasi hukum yang merupakan dasar prinsip aturan hukum negara demokratis yang berkeadilan social (Asshiddiqie, 2005) . Demokrasi di Indonesia dituangkan melalui pemilihan secara langsung. Dengan ini maka diharapkan aspirasi masyarakat akan tersampaikan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Adapun prinsip demokrasi seperti yang disebutkan oleh J.B.J.M Ten Berge adalah sebagai berikut (HR, 2002; Muntoha, 2009).

Partai politik diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, yang menetapkan syarat pendirian, pendaftaran, dan peran partai dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai harus terdaftar sebagai badan hukum dan memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya. Partai politik adalah pilar utama dalam sistem demokrasi, berperan penting dalam menyediakan alternatif pemimpin dan program kebijakan bagi masyarakat. Sebagai wadah bagi aspirasi politik, partai politik berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam pemerintahan dan menjadi jembatan antara warga negara dan lembaga legislatif. Dengan demikian, peran sentral partai politik dalam demokrasi sangat signifikan. Kodiman & Fatimah, (2023) pernah mengungkapkan, "Partai politik merupakan kolaborasi yang memerlukan kontribusi dari pihak di luar partai politik untuk melaksanakan rencana yang telah direncanakan guna mencapai tujuan dari kemitraan tersebut."

Dalam menjaga kesehatan demokrasi, pendidikan politik memainkan peran penting. Menurut Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Tujuan dari pendidikan politik bagi bangsa Indonesia sendiri, yaitu(a) Paham akan hal situasi politik-sosial yang penuh dari konflik, (b) Dapat memperjuangkan kepentingan bersama dan ideologi agar sejahteranya kehidupan, (c) Berani dalam bertindak tegas untuk membangun situasi yang damai, (d) Membangun kesadaran dalam dunia politik yang ideal dan sadar berkenaan hak serta juga kewajiban sebagai anggota masyarakat dan negara yang baik. (Rahimah, 2021).

Pendidikan politik sangat penting karena membantu masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta

berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Melalui pendidikan politik, individu dapat berpikir kritis, menilai kandidat dan kebijakan secara cerdas, serta menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Tanpa pendidikan politik yang memadai, masyarakat akan mengalami kesenjangan informasi, rendahnya partisipasi politik, hingga meningkatnya praktik politik transaksional dan apatisme politik. Sebagai aktor strategis dalam demokrasi, partai politik memiliki akses, struktur, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendidik masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi publik, pelatihan kader, kampanye isu, hingga dialog kebangsaan **(Romli, 2011).**

Namun, dalam praktiknya, fungsi pendidikan politik sering kali terpinggirkan oleh orientasi jangka pendek partai politik yang lebih berfokus pada perolehan suara dalam pemilu. Banyak kegiatan partai yang diklaim sebagai pendidikan politik justru bersifat seremonial atau transaksional, seperti pembagian bantuan sosial yang diselipkan dengan simbol partai menjelang pemilu, tanpa memberikan pemahaman mendalam tentang sistem politik, ideologi, atau kebijakan publik. Hal ini menunjukkan terjadinya komersialisasi pendidikan politik**,** di mana masyarakat diposisikan sebagai objek pasif, bukan sebagai warga negara yang kritis (Hidayat, 2010).

Kelemahan lain dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Indonesia terletak pada lemahnya ideologisasi partai. Sebagian besar partai politik saat ini cenderung berorientasi pragmatis dan tidak memiliki basis ideologis yang kuat. Hal ini berdampak pada minimnya konten pendidikan politik yang bersifat mendalam dan transformatif. Kader partai sering kali tidak dibekali dengan pemahaman ideologis atau wawasan politik yang luas, sehingga kegiatan pendidikan politik yang dilakukan pun menjadi dangkal dan tidak sistematis (Ufen, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis peran partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik di tengah dinamika demokrasi Indonesia. Pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini mencakup: sejauh mana partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik sesuai mandat normatifnya? Apa saja bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai? Dan, faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan fungsi tersebut? Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memperkuat peran partai politik sebagai agen pendidikan politik yang efektif dan berintegritas.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di STKIP Budidaya serta studi literatur dari berbagai sumber akademik terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi Pendidikan politik bagi partai gelora. Jenis penelitian ini merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian. Data yang dianalisa sesuai dengan kenyataan yang ada kemudian dihubungkkan dengan berbagai teori-teori untuk mendukung pembahasan sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnyan (Sugiyono, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Gelora (Partai Gelombang Rakyat Indonesia) didirikan oleh tokoh-tokoh eks-PKS, seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. Gelora hadir sebagai respons terhadap dinamika internal PKS dan keinginan untuk membangun platform politik yang lebih inklusif. Partai Gelora mengusung ideologi nasionalisme yang kolaboratif, yang mencoba menjembatani berbagai kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Mereka memadukan nilai-nilai Islam dengan pendekatan modern dan terbuka. Teori Sistem Multipartai: Gelora hadir sebagai salah satu partai dalam sistem multipartai Indonesia. Dalam teori ini, partai baru harus menciptakan "diferensiasi" agar dapat menarik basis dukungan. Teori mobilisasi massa menjadi strategi utama Gelora adalah menggerakkan massa melalui narasi politik yang relevan dengan kaum muda

dan profesional. Dalam konteks sistem multipartai di Indonesia, keberadaan partai baru seperti Gelora menjadi wajar, karena sistem ini memang membuka ruang kompetisi yang luas bagi berbagai kekuatan politik (Sartori, 2005).

Mengusung visi yakni membangun Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia dan misi memberikan solusi nyata dalam isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan pendekatan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan program unggulan yang mereka terapkan yakni:

- Penguatan demokrasi: Mendorong sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif.
- Kesejahteraan ekonomi: Fokus pada pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi.
- Pendidikan politik: Memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar lebih kritis dan aktif dalam proses demokrasi.

Basis dukungan dan strategi partai gelora berfokus pada kelompok muda dan profesional yang dinilai memiliki semangat kolaboratif. Strategi utama adalah penggunaan media sosial untuk menyebarkan narasi partai dan membangun komunitas berbasis isu. Adapun tantangan yang dihadapi oleh partai gelora seperti kurangnya pengenalan masyarakat tentang partai ini karena masih relatif baru (didirikan pada 2019) dan persaingan dengan partai besar lain yang sudah mapan, seperti PKS, PDIP, dan Gerindra. Namun, untuk dapat bertahan dan berkembang, sebuah partai baru tidak cukup hanya dengan diferensiasi ideologis, melainkan juga harus mampu menciptakan keterikatan yang kuat dengan masyarakat melalui fungsi-fungsi substantif, seperti pendidikan politik (Gunther & Diamond, 2003).

Hambatan Penerapan Pendidikan Politik Di Partai Gelora

Pendidikan politik di Partai Gelora merupakan upaya penting untuk menciptakan kader dan masyarakat yang lebih sadar serta aktif dalam proses demokrasi. Namun, sebagai partai baru, Gelora menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal dan dari berbagai aspek:

1. Tujuan Utama:

Pendidikan politik di Gelora berfokus pada membangun kesadaran politik masyarakat, meningkatkan literasi politik, dan memperkuat demokrasi partisipatif. Hal ini sejalan dengan visi partai untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dunia.

2. Hambatan Utama:

Keterbatasan sumber daya partai sebagai organisasi yang baru berkembang. Rendahnya literasi politik masyarakat, terutama di kalangan non-pemilih aktif. Dominasi partai-partai mapan yang lebih dikenal oleh publik. Kurangnya akses yang merata terhadap program pendidikan politik, terutama di wilayah pedesaan atau pinggiran.

3. Strategi:

Gelora memanfaatkan media digital untuk menjangkau kelompok muda dan profesional. Namun, pendekatan ini perlu diimbangi dengan kegiatan tatap muka di komunitas agar lebih relevan dan efektif.

4. Signifikansi:

Pendidikan politik yang efektif dapat membantu Gelora membangun basis dukungan yang kuat, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

5. Hambatan Internal

Kaderisasi yang Belum Matang: Sebagai partai baru (didirikan 2019), Gelora masih dalam tahap membangun struktur organisasi dan kaderisasi. Hal ini menghambat efektivitas pendidikan politik, terutama di tingkat akar rumput. Sumber Daya Terbatas: Partai ini mungkin menghadapi keterbatasan dana, tenaga ahli, atau akses ke platform pendidikan yang lebih luas.Konsolidasi yang Belum Merata: Struktur kepengurusan yang baru seringkali belum merata di seluruh daerah, sehingga program pendidikan politik tidak dapat diterapkan secara seragam.

6. Hambatan Eksternal

Kurangnya Kepercayaan Publik: Sebagai partai baru, Gelora harus bersaing dengan partai mapan dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pendidikan politik bisa jadi kurang efektif jika masyarakat belum percaya terhadap

partai itu sendiri. Stigma terhadap Partai Baru: Banyak masyarakat yang menganggap partai baru kurang berpengalaman dan hanya alat politik semata, sehingga pendidikan politik yang ditawarkan kurang diminati. Polarisasi Politik: Dalam situasi politik yang terpolarisasi, narasi politik partai bisa kalah bersaing dengan isu-isu populis yang lebih mudah diterima masyarakat.

7. Hambatan Teknis

Literasi Politik yang Rendah: Tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik masih rendah, sehingga partai perlu menyederhanakan materi pendidikan politik agar lebih relevan dan mudah dipahami. Ketergantungan pada Media Digital: Gelora banyak memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan narasi politiknya. Namun, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses atau kemampuan menggunakan media digital dengan baik. Kompleksitas Materi: Pendidikan politik sering kali dianggap sebagai isu yang berat dan kurang menarik, sehingga sulit menjangkau kelompok masyarakat tertentu seperti pemuda non-aktivis atau masyarakat di pedesaan.

8. Hambatan Kontekstual

Persaingan dengan Partai Lain: Partai-partai besar juga memiliki program pendidikan politik, yang mungkin lebih menarik karena didukung oleh sumber daya yang lebih besar. Minimnya Ruang Dialog Politik: Budaya diskusi politik yang konstruktif di masyarakat masih minim, sehingga pendidikan politik seringkali tidak berlanjut pada tindakan nyata. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung: Jika pendidikan politik tidak didukung oleh regulasi pemerintah, partai harus bekerja lebih keras untuk mengedukasi masyarakat.

Banyaknya tantangan dan hambatan yang menghalangi setiap upaya Pendidikan politik bagi masyarakat yang diterapkan oleh Partai Gelora, tidak terlepas pada beberapa tantangan yang dikemukakan oleh Katerini Kartono (200), yakni:

1. Karena mereka telah hidup dalam lingkungan penindasan, eksploitasi, dan penjajahan dalam waktu yang lama dan telah "terbiasa" hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, maka sangat sulit untuk meningkatkan kesadaran rakyat akan keadaan mereka sendiri, yang ditandai dengan penderitaan dan kemiskinan yang ekstrem.
2. Sulit untuk membuat mereka mengkomunikasikan secara terbuka setiap masalah yang mereka alami.
3. Masyarakat sulit untuk percaya pada gerakan politik dan inisiatif pendidikan yang dianggap palsu dan dimaksudkan untuk membuai mereka; sinisme politik dan ketidakpedulian, yang dapat berubah menjadi sikap yang menyedihkan, memperparah masalah ini. Selain itu, sulit untuk meyakinkan mereka (dirinya).
4. Masyarakat umum sulit memahami seluk-beluk sosial dan politik di sekitar mereka karena kurangnya pendidikan.
5. Perhatian utama mereka adalah mempertahankan status quo dan menegakkan kontrol mereka, rezim otoriter biasanya hanya memiliki sedikit ketertarikan pada pendidikan politik. Karena membatasi otoritas dan kebebasan organ-organ negara, keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan terhadap proses politik tidak diinginkan.

Solusi yang bisa diupayakan oleh Partai Gelora Binjai agar terealisasinya Pendidikan politik dengan baik di lingkungan masyarakat, yakni:

1. Kolaborasi dengan LSM atau Akademisi: Menggandeng pihak ketiga untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas program pendidikan politik.
2. Pendekatan Lokal: Menyesuaikan materi pendidikan politik dengan kebutuhan dan konteks masyarakat setempat.
3. Penguatan Digitalisasi: Menggunakan media digital secara kreatif, seperti video singkat atau infografis, untuk menarik perhatian generasi muda.
4. Melibatkan Komunitas: Membentuk kelompok diskusi di komunitas untuk mendekatkan partai pada masyarakat secara langsung.

Solusi yang ditawarkan oleh penelitian, seperti kolaborasi dengan LSM atau akademisi,

pendekatan lokal, dan penggunaan media kreatif, sejalan dengan pendekatan *"blended political education"* yang menggabungkan sumber daya eksternal dan internal. Strategi ini sesuai dengan pemikiran Huntington (1968) bahwa stabilitas politik dalam demokrasi baru sangat dipengaruhi oleh kemampuan partai politik dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan melalui pendidikan politik yang efektif.

IV. KESIMPULAN

Partai Gelora Kota Binjai secara normatif menyadari pentingnya pendidikan politik**,** namun masih menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan fungsinya. Faktor-faktor seperti lemahnya struktur internal, minimnya sumber daya, rendahnya literasi politik, serta dominasi partai mapan, menjadi penghambat utama. Namun, strategi seperti pendekatan komunitas, digitalisasi kreatif, dan kolaborasi lintas sektor berpotensi menjadi solusi jangka menengah dan panjang.

Memperkuat fungsi pendidikan politik secara konsisten dan adaptif, Partai Gelora tidak hanya dapat membangun basis dukungan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap demokratisasi di tingkat lokal dan nasional. Pentingnya penyelenggaraan kegiatan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Pendidikan politik yang efektif harus melibatkan diskusi, simulasi, dan program pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.

Gunther, R., & Diamond, L. (2003). Species of Political Parties: A New Typology. *Party Politics*, 9(2), 167–199.

Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2016). Comparative Government and Politics: An Introduction. Palgrave Macmillan.

Hidayat, S. (2010). *Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.

Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics? Rand McNally.

Matta, Anis. (2021). Gelombang Ketiga Indonesia: Visi Indonesia Masa Depan. Partai Gelora Indonesia.

Rush, M., & Althoff, P. (1971). An Introduction to Political Sociology. Nelson.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.

Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.

Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR Press.

Supriyanto, A. (2020). "Pendidikan Politik di Era Digital: Studi Kasus Partai Politik di Indonesia." Jurnal Politik Indonesia, 12(1), 23-40.

Partai Gelora Indonesia. (2024). Visi, Misi, dan Program Partai Gelora. Diakses dari https://partaigelora.id.

Romli, L. (2011). Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), 1–15.

Setiawan, F. (2023). "Tantangan Pendidikan Politik di Indonesia: Perspektif Partai Baru." Artikel di Kompas.id.

Ufen, A. (2008). Political Party and Party System Institutionalization in Southeast Asia: Lessons for Democratic Consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand. *Pacific Review*, 21(3), 327–350.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Peran Partai Politik dalam Pendidikan Pemilih. Diakses dari https://kpu.go.id